

PARADIPLOMASI PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT MELALUI SISTER PROVINCE DENGAN REPUBLIK BASHKORTOSTAN RUSIA

Andrias Darmayadi, Sylvia Octa Putri

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer
Indonesia, Jl. Dipati Ukur No. 112 – 116 Kota Bandung 40132, Indonesia

Andrias.darmayadi@email.unikom.ac.id

Abstract

The purpose of this study is to provide recommendation data to the West Java Provincial Government in its para-diplomacy strategy through sister province cooperation with the Republic of Bashkortostan in Russia. These two regions have a lot of potential that can be developed and further optimized within the framework of cooperation. The problem that comes to the surface is that often the Regional Government in a province builds cooperation by signing an MoU, but the basis for this cooperation is not based on mapping the potential and needs of the City and District in the Province, because cooperation is more emphasized on the political aspect, so that many collaborations do not work optimally (sleeping agreement). The methodology used in this study is a descriptive qualitative method where this is a comprehensive method, which is intended to find comprehensive data on all objects of study which are then analyzed and made substantial comparisons. The research plan stage will begin by mapping out sectors that have the potential to collaborate with the Republic of Bashkortostan, this mapping stage will involve all districts/cities in West Java Province. After mapping and then conducting field research and surveys, then data analysis will be carried out on the findings of field research related to which sectors and which districts have great potential to collaborate with the State of Bashkortostan. The target of this research is to produce data that can be used as input and recommendations for the West Java Provincial Government in order to build optimal, effective, efficient and successful sister province cooperation

Keywords: *Paradiplomacy, Sister Province, West Java, Bashkortostan*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan data rekomendasi terhadap Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam strategi paradiplomasi melalui kerjasama sister province dengan republic Bashkortostan di Rusia. Kedua Daerah ini memiliki banyak potensi yang dapat dibangun dan lebih dioptimalkan dalam kerangka kerjasama. Permasalahan yang muncul ke permukaan adalah seringkali Pemerintah Daerah di sebuah provinsi membangun kerjasama dengan menandatangani MoU namun landasan kerjasama tersebut tidak berdasarkan pemetaan potensi dan kebutuhan Kota dan Kabupaten dalam Provinsi tersebut, karena kerjasama lebih ditekankan pada aspek politisnya, sehingga banyak kerjasama yang tidak berjalan dan optimal (*sleeping agreement*). Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dimana ini adalah metode yang menyeluruh, yang dimaksudkan mencari data komprehensif terhadap semua objek kajian yang kemudian analisa serta melakukan perbandingan secara substansial. Tahapan rencana penelitian akan dimulai dengan melakukan pemetaan terhadap sector-sector yg berpotensi utk dilakukan kerjasama dengan Republik Bashkortostan, tahapan pemetaan ini akan melibatkan semua Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Barat. Setelah dilakukan pemetaan dan kemudian dilakukan penelitian lapangan serta survey maka kemudia akan dilakukan analisa data hasil temuan penelitian lapangan terkait sector-sector mana saja dan Kabupaten Kota Mana saja yang berpotensi besar untuk dapat bekerjasama dengan Negara Bagian Bashkortostan. Target Penelitian ini adalah dapat menghasilkan data yang dapat dijadikan input dan rekomendasi untuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar dapat membangun kerjasama *sister province* yang optimal, efektif, efisien dan Sukses

Kata Kunci : Paradiplomasi, Sister Province, Jawa Barat, Bashkortostan

1. Pendahuluan

Kebijakan luar negeri secara tradisional merupakan domain dari pemerintah pusat dari sebuah negara, tetapi seiring dengan berlangsungnya era globalisasi tidak mungkin jika hanya ada satu pihak saja yang memegang kewenangan dalam menjalankan politik luar negeri. Kompleksitas hubungan internasional menghendaki pergeseran ini, karena pemerintah pusat tidak lagi cukup memiliki kapasitas untuk mengatasinya.

Di Indonesia, meningkatnya peran aktor non-negara khususnya aktor subnasional dalam hubungan internasional pertama kali didorong oleh lahirnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang mengatur perluasan kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan kerjasama luar negeri. Meskipun undang-undang ini dikritik karena terlalu “liberal” sehingga memberi kewenangan yang terlalu luas kepada pemerintah daerah, tetapi undang-undang penggantinya yaitu Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah tetap menjamin kewenangan daerah untuk melakukan kerjasama luar negeri. Saat ini telah banyak pemerintah daerah, baik itu dari tingkat kabupaten/kota maupun provinsi yang

menjalin kerjasamaluar negeri, termasuk di antaranya adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Pada umumnya praktek kerjasama antara pemerintah daerah di Indonesia dengan mitranyadi luar negeri ditujukan dalam kerangka otonomi daerah yang memicu daerah untuk mengembangkan kapasitasnya secara mandiri. Secara sederhana dapat dikatakan praktek ini guna menyokong kepentingan daerah, menyelesaikan persoalan-persoalan pembangunan dan untuk memanfaatkan potensi daerah secara optimal, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang Dasar Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada Daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban penyelenggaraan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Seiring dengan prinsip tersebut, penyelenggaraan otonomi daerah harus

selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan. Pada kenyataannya daerah memiliki keterbatasan-keterbatasan yang dapat menghambat upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Daerah dituntut untuk lebih proaktif dalam mencari sumber serta memaksimalkan potensi yang dimiliki melalui kerja sama dan kemitraan dengan berbagai pihak yang kompeten.

Salah satu bentuk kerja sama dan kemitraan adalah kerja sama *Sister Province*, dimana daerah, dengan mempertimbangkan potensinya dapat melakukan kerja sama dengan provinsi di negara lain, untuk kepentingan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Pemilihan mitra kerja sama dari luar negeri dapat dilakukan dengan berbagai pertimbangan dan kepentingan, diantaranya kesetaraan status administrasi, kesamaan karakteristik, kesamaan permasalahan, upaya saling melengkapi dan peningkatan hubungan

antar masyarakat, serta adanya kepentingan lain seperti perdagangan dan alih teknologi, yang dirasa belum cukup terakomodasi jika kerja sama dilakukan dengan pihak-pihak lain dalam tataran domestik.

Pentingnya peningkatan dan pengembangan kerja sama daerah sebagaimana dimaksud di atas, telah menjadi agenda Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah dan mengembangkan potensi daerah. Namun demikian, beberapa dokumen kerja sama yang telah dibuat belum terimplementasi dengan baik dan hasil serta manfaatnya belum dirasakan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Letter of Intent* yang telah dibuat tidak meningkat menjadi sebuah Memorandum saling Pengertian atau bentuk perjanjian lainnya, sedangkan MoU-nya seringkali menjadi sebuah *sleeping agreement/dormant*. Adapun salah satu yang menjadi kendala adalah sistem perencanaan yang lemah.

Salah satu langkah untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah

Provinsi Jawa Barat telah membuat dokumen *Grand Design* Kerja sama Daerah (GDKD) yang berisi program, kegiatan, strategi dan model kerja sama daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. *Grand Design* ini diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam merencanakan dan melaksanakan kerja sama daerah. Untuk kerja samaluar negeri khususnya kerja sama *Sister Province*, Terdapat beberapa Pemerintah daerah di luar negeri yang menjadi prioritas kerjasama, dan salah satunya adalah Republik Bashkortostan di Rusia.

Pertimbangan Pemilihan Republik Bashkortostan sebagai salah satu prioritas pembangunan kerjasama adalah karena Republik Bashkortostan termasuk negara bagian yang paling maju secara ekonomi dan memiliki potensi besar dalam berbagai sector.

Negara bagian inimenjadi tempat utama tujuan investasi karena tingkat resiko yang relatif rendah di Rusia. Secara geografis, meskipun memiliki posisi sebagai *landlocked territory*, letak Bashkortostan memiliki makna ekonomi karena berada di tepi batas wilayah Asia dan Eropa. Bashkortostan dapat menjadi pintu masuk bagi promosi dan

pemasaran produk-produk Indonesia, khususnya dari Jawa Barat untuk wilayah Rusia Ural dan sekitarnya, sekaligus kawasan Asia Tengah dan Kaukasia Melalui kemitraan dengan Republik Bashkortostan ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat diharapkan dapat mengupayakan dan memaksimalkan perluasan jangkauan hubungan ekonomi dan perdagangan dengan wilayah-wilayah lain di sekitar Ural –Chuvasia, Tatarstan, Udmurtia, Mari El, dan Mordovia, plus sebagian Asia Tengah dan kawasan Kaukasia.

Duta Besar RI untuk Federasi Rusia merangkap Belarusia, M. Wahid Supriyadi, pada tahun 2016 silam pernah menyinggung hal ikhwal pembentukan *sister province* antara Provinsi Jawa Barat dan Republik Bashkortostan dengan merujuk fakta sejumlah similaritas antara kedua wilayah, terutama sektor industri – mesin, petrokimia, energi - , pertanian dan peternakan serta pendidikan. dalam Pernyataannya Presiden Republik Bashkortostan, Rustam Khamitov juga menegaskan bahwa Bashkortostan sangat mengharapkan adanya hubungan yang lebih dekat dengan wilayah-wilayah di Indonesia dalam rangka saling bertukar potensi dan kesempatan

untuk memajukan daerah. Hal ini setidaknya juga metujuk fakta sosial-budaya bahwa Bashkortostan adalah salah satu sentra populasi muslim, selain Tatarstan, Dagestan, Chechnya, sehingga dimungkinkan tak ada lagi hambatan psikologis antara wilayah-wilayah di Indonesia, termasuk Jawa Barat dalam membangun hubungan kemitraan.

2. Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran

2.1. *State of The Art*

Penelitian ini mengambil beberapa referensi penelitian terdahulu terutama dari jurnal- jurnal yang berhubungan dan terkait dengan penelitian ini, guna mengadaptasi perkembangan terkini dan menegaskan novelty (hal baru) yang disumbangkan penelitian ini. Jurnal-jurnal yang diambil adalah yang terkait dengan Kerjasama Sister Province dan Paradiplomacy .

Penelitian yang pertama yang berjudul “Para-diplomacy: Concept and the Context” yang ditulis oleh Rakhahari Chatterji, Swagata Saha yang dipublikasikan pada India Quarterly : Journal of International Affairs Vol 73, Issue 4, 2017 [1]. Hasil dari penelitian ini adalah Para- diplomasi dan munculnya

unit federasi / komponen yang diberdayakan yang terlibat dalam interaksi internasional memerlukan kalibrasi ulang teori dan pemahaman tentang Hubungan Internasional. Perdebatan tentang kontrol pusat versus otonomi unit menimbulkan kekhawatiran: apakah para-diplomasi akan menjadi aset atau ancaman bagi negara berdaulat. Sementara negara dapat memperoleh manfaat dari pembangunan ekonomi, para-diplomasi masih dapat menyebabkan ketidakseimbangan regional, mobilisasi etnis dan separatisme. Alasan Penelitian ini dijadikan Tinjauan Pustaka karena penelitian ini memberikan kerangka dasar Paradiplomasi yang dapat dijadikan pedoman dasar dalam membuat ataupun menyusun penelitian terkait paradiplomasi ataupun sister province.

Penelitian kedua yang dijadikan referensi adalah “Paradiplomacy Management and Local Political Movement in Aceh, Indonesia, and Catalonia, Spain” yang ditulis oleh Takdir AliMukti dan kawan-kawan pada European Journal of East Asian Studies Volume 18: Issue 1 tahun 2019 [2]. Penelitian ini berfokus pada manajemen paradiplomatik di Aceh, Indonesia, dan Catalonia, Spanyol, sebagai studi

banding. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Dua daerah yang berbeda tersebut setidaknya memiliki dua ciri yang sama: keduanya diakui oleh pemerintah pusat sebagai provinsi yang memiliki otonomi luas dibandingkan dengan provinsi lain, dan sama-sama memperoleh otonomi yang lebih luas pada periode yang sama, 2006; mereka juga memiliki masalah yang sama dengan kelompok revolusioner yang berusaha mundur dari pemerintahan pusat. Alasan penelitian ini dijadikan Tinjauan Pustaka dikarenakan penelitian ini mempunyai tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pola paradiplomatik serta mengkaji aktivisme paradiplomatik yang berkaitan dengan instrumen gerakan politik di masing-masing wilayah.

Penelitian berikutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Caterina García Segura dan John Etherington yang berjudul “National State Foreign Policy and Regional External Action: An Uneasy Relationship” yang dipublikasikan oleh Euborders Working Paper 07 (series), September 2017 [3]. Penelitian ini membahas tindakan eksternal daerah sub-negara, yang telah tumbuh secara eksponensial dalam beberapa dekade terakhir, dan

menanyakan dalam kondisi apa tindakan eksternal ini dianggap sebagai tantangan bagi kebijakan luar negeri negara-bangsa dan, dengan perluasan, terhadap kedaulatan negara. Penelitian ini dijadikan Tinjauan Pustaka dikarenakan memberikan analisa kasus yang dipahami sebagai uji masuk akal untuk memeriksa faktor-faktor dan kondisi di bawah apa paradiplomasi berubah menjadi protodiplomasi.

Berikutnya adalah penelitian yang berjudul “Decentralization of Foreign Cooperation: Case Study of Sister Province Cooperation between West Java, Indonesia and South Australia,” yang ditulis oleh Andriani Florencia Dharmajaya dan Anggara Raharyo dari President University yang dipublikasikan Jurnal Politica Vol. 10 No. 1 Mei tahun 2019 [4]. Penelitian ini membahas tentang kerjasama Sister Province antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Negara Bagian Australia Selatan dengan hasil penelitiannya adalah bahwa kekuatan dan potensi Negara Bagian Australia Selatan terfokus pada industri dan manufaktur berbasis teknologi maju, serta sektor pendidikan dan pelatihan. Terlepas dari adanya sektor yang lain yang mungkin menjadi salah satu substansi yang penting, namun industri

dan manufaktur berbasis teknologi maju serta pendidikan dan pelatihan seyogyanya dapat dijadikan titik tumpu terpenting dalam bangunan kerjasama berbasis kemitraan. Karakteristik Australia Selatan yang sedemikian rupa idealnya dapat lebih didalami secara lebih optimal oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka merakit persiapan kerjasama dengan Australia Selatan, khususnya dengan beberapa daerah kota-kabupaten di Jawa Barat. Oleh karena adanya disparitas yang besar dengan beberapa daerah di Jawa Barat yang dipersiapkan untuk membentuk kerjasama kemitraan, maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai inisiator selayaknya mampu membantu proses penyiapan dan studi kelayakan, terkait pembukaan potensi setempat yang akan menarik untuk digarap dengan Australia Selatan. Alasan Penelitian ini dijadikan sebagai Tinjauan Pustaka karena penelitian ini menggambarkan langkah- langkah kebijakan strategi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam membangun konstruksi kerjasama *Sister Province* dengan Australia Selatan yang menyesuaikan dengan karakteristik dan keunggulan serta potensi masing-masing daerah.

Penelitian berikutnya adalah yang berjudul “Implementasi Kebijakan Kerjasama LuarNegeri Sister Province di Provinsi Jawa Tengah” yang ditulis oleh Masrohatun dari Universitas Islam Negeri Walisongo Malang [5]. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan Lemahnya komitmen dari sister province untuk mentaati perjanjian, Komite bersama yang diagendakan bertemu tiap setahun sekali sebagai forum evaluasi, belum bisa berjalan, kemudian Peran dari dinas – dinas terkait di Provinsi Jawa Tengah belum dilaksanakan dengan maksimal. Hasil lainnya adalah menunjukkan Minimnya program-program kerjasama yang terealisasi serta juga .Data hasil investasi dan perdagangan ekspor maupun impor disebutkan kurang terinci. Faktor-faktor pendukung antara lain. Alasan Penelitian ini dijadikan Tinjauan Pustaka kerana penelitian ini menggambarkan perlunya transmisi kebijakan yang jelas dan konsisten dari Biro Otda dan Kerjasama ke dinas-dinas terkait kerjasama luar negeri dalam skema sister province, serta merujuk bagaimana pentingnya sumber anggaran yang cukup dan action plan yang terencana (seperti SOP).

2.2. Landasan Teori

a. Desentralisasi Kebijakan Luar Negeri

Hubungan Luar Negeri dalam bentuk kerja sama internasional pada dasarnya merupakan suatu tuntutan sekaligus kebutuhan bagi setiap negara. Secara tradisional, kebijakan luar negeri dianggap sebagai *domain* pemerintah nasional atau pemerintah pusat yang merepresentasikan negara. Presiden, Parlemen dan Kementerian Luar Negeri dalam hal ini merupakan *agent* penting dalam struktur dan proses pengambilan kebijakan luar negeri serta diplomasi internasional untuk mewujudkan apa yang didefinisikan sebagai 'kepentingan nasional'.

Seiring dengan tekanan globalisasi, meningkatnya kompleksitas persoalan yang dihadapi oleh setiap negara di berbagai bidang kehidupan, baik sosial, ekonomi maupun politik, telah membuat saling ketergantungan antar negara di dunia juga semakin meningkat. Secara logis karenanya aktor kerja sama internasional pun tidak mungkin lagi didominasi oleh pemerintah pusat suatu negara.

Ledakan penduduk, arus urbanisasi, laju industrialisasi serta krisis ekologis dan sosial yang menggejala di kawasan

urban dewasa ini telah menempatkan Pemerintah Daerah sebagai pusat perhatian dunia dewasa ini karena menjadi pemain kunci dalam penyediaan layanan publik yang berkualitas bagi masyarakat (Birch & Wachter, 2011). Menurut Garesche pertumbuhan dan perkembangan pesat Provinsi-provinsi di berbagai belahan dunia dalam dua dekade terakhir ini telah memperkuat kembali fenomena lama '*paradiplomacy*', dimana Provinsi dan Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam mempengaruhi hubungan internasional suatu negara. Jenis aktivitas diplomatik ini disebut juga '*low diplomacy*'. Berbeda dengan '*high diplomacy*' yang merupakan domain pemerintah nasional, '*low diplomacy*' merupakan arena Pemda dan biasanya mencakup beragam bentuk kerja sama di seputar masalah perkotaan dan kaum urban (Garesche, 2007).

Meskipun maraknya inisiatif kerja sama antar provinsi antar negara di dunia ini semakin mengukuhkan jejaring kerja sama provinsi-provinsi di seluruh dunia, hal ini tidak serta merta merefleksikan versi kecil dari hubungan internasional tradisional. Jejaring kerja sama antar provinsi antar negara ini lebih dimaksudkan sebagai suatu cara yang

efektif untuk memperkuat kapasitas provinsi dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dan lingkungan, memberikan pelayanan publik yang lebih memadai bagi masyarakatnya, serta mengembangkan tata kelola dan struktur manajemen provinsi. Pengaruh jejaring kerja sama ini bahkan mampu mendorong munculnya fenomena baru yang disebut “*glocal governance*”. Menurut de Villiers, sasaran utama dari kerja sama provinsi bersaudara pada hakekatnya adalah seluruh komunitas provinsi itu, baik kelompok masyarakat sipil maupun komunitas bisnis. Lebih lanjut de Villiers berpendapat bahwa Pemda memainkan peran sebagai fasilitator, namun penyimpul utamanya adalah antara sesama komunitas itu sendiri (Villiers, 2006).

Hubungan internasional yang berkembang lewat model ataupun mekanisme kerja sama atau kemitraan antarprovinsi antar negara di dunia pada dasarnya memiliki banyak terminologi. Bukan hanya ‘provinsi bersaudara’ (*sister provinces*) tetapi juga *friendship partnerstadt*, *jumelage*, *decentralized cooperation*, *municipal international cooperation*, dan *stedenbanden*. Sangat variatif, mulai dari pertukaran kebudayaan dan persahabatan sampai

dengan pemasaran produk-produk provinsi dan pembangunan ekonomi (Carter, 2001).

Kerja sama provinsi bersaudara pada akhirnya dapat menjadi pembentuk jejaring transnasional antar warga kota di seluruh dunia yang memperkuat ‘*global citizenship*’. Eropa merupakan ladang yang subur bagi tumbuh kembangnya kerja sama provinsi bersaudara ini. Kern dalam studinya menyorot bagaimana jejaring kerja sama antar Pemda di Eropa, yang diistilahkan dengan “*Horizontal Europeanization*” telah berperan dalam mewujudkan integrasi Eropa. Keberadaan Pemda telah memberi kontribusi bagi terbentuknya *multilevel governance* di Eropa, yang tidak hanya berbasis pada *national and supranational system of governance* tetapi juga *local governance* (Kern, 2009). Studi menarik lainnya mengaitkan bagaimana jejaring kerja sama transnasional provinsi- provinsi di seluruh dunia telah memunculkan fenomena yang disebut sebagai ‘*milieux of innovation*’ (Castells, 2003). Fenomena ini merujuk pada kemampuan provinsi untuk menjadi sumber- sumber kemakmuran baru di era informasi melalui kompleksitas aktivitas produksi,

proses informasi, riset dan kreativitas di wilayahnya.

b. Kerjasama Daerah Dengan Mitra Luar Negeri

Fenomena globalisasi telah membuka peluang interaksi dan transaksi yang lebih luas antaractor di dunia, baik aktor negara (*state actor*), sub-negara (*sub-state*), maupun non-negara (*non-state actor*). meningkatnya intensitas interaksi tersebut mencakup segala dimensi dan bidang. Hal inilah yang membuka peluang bagi actor sub-negara (*sub-state*), dalam hal ini Pemerintah Daerah untuk menjalin kerjasama dengan mitra luar negerinya guna meng-optimalisasi pembangunan daerahnya. Mitra luar negeri tersebut dapat berupa Pemerintah daerah asing, organisasi non-pemerintah, swasta dan perseorangan. Fenomena tersebut merupakan bagian dari apa yang disebut dengan “paradiplomasi”.

Tujuan dilakukannya diplomasi didunia internasional adalah untuk memenuhi ataupun memperjuangkan kepentingan nasional (Stagnell, 2020). Lebih jauh daripada hal tersebut tujuan lain dilakukannya diplomasi adalah menginjak kepada tahapan bagaimana kepentingan Indonesia tersebut mampu

merujuk dan memenuhi kebutuhan dari daerah-daerah di wilayah Indonesia.

Isu atau *trend* tentang paradiplomasi membuat peluang dan harapan baru bagi PemerintahProvinsi / kabupaten / Kota di Indonesia dengan memanfaatkan sumber-sumber internasional / multinasional /transnasional secara lebih proposional. Pada dasarnya hal ini mengarah kepada kritisi mutakhir atau dominasi *nation-state* serta diskursus partisipasi *sub-state actor* dan *sub-national governance* yang termajinalisasikan.

Pada hakikatnya, tidak ada satupun negara yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. salah satunya adalah urusan sosial (pada analisis kebijakan luar negeri atau perspektif politik duniatersaji makna *societal* sama dengan *social* dikurangi *governmental*) yang selalu bersifat kompleks sehingga tidak mustahil ada bias simplifikasi dari masalah-masalah ilmiah, termasuk kompleksitaspembagian tanggung jawab dalam mencapai kepentingan nasional yang diteorikan untuk diplomasi (Frankel, 1970).

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya di Indonesia, meningkatnya peran aktor non-negara khususnya aktor sub-nasional dalam hubungan

internasional pertama kali didorong oleh lahirnya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang mengatur perluasan kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan kerjasama luar negeri. Begitupun Undang-Undang penggantinya yaitu UU NO. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban penyelenggaraan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam kerjasama luar negeri dikenal bentuk kerjasama *sister*, yaitu kerjasama antara dua wilayah yang memiliki status wilayah administrasi setara dan kerjasama ini merupakan payung besar bagi Kerjasama berbagai sector, karena ruang lingkupnya akan terdiri dari berbagai sektor pembangunan. Dalam melaksanakan hubungan luar negeri, khususnya pada konteks kerjasama *sister* di Indonesia, Pemerintah Daerah harus mengacu pada aturan dan prinsip-prinsip yang berlakumeliputi persamaan kedudukan, memberikan manfaat, tidak mengganggu stabilitas politik, menghormati kedaulatan NKRI, transparan dalam pelaksanaan program, tidak menimbulkan ketergantungan,

terencana, dan mempunyai hasil yang dapat dirasakan secara jangka panjang.

Dalam ruang lingkup ekonomi, sosial, politik dan budaya, pelaksanaan otonomi daerah dalam hubungan luar negeri, penerapannya merupakan jawaban dari adanya tuntutan globalisasi yang sudah seharusnya lebih memberdayakan daerah dengan cara diberikan kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada didaerahnya masing-masing, desentralisasi merupakan simbol atau tanda adanya kepercayaan Pemerintah Pusat kepada daerah.

c. Paradiplomasi

Paradiplomasi merupakan desentralisasi kekuasaan politik dan kewenangan administrative dalam sebuah proses yang terjadi pada aktor-aktor sub-nasional, Institusi politik dan kebijakan public untuk suatu pemerintahan pusat dalam kewenangan menjalankan hubungan luar negeri, karena pemerintah daerah merupakan bentuk yang nyata dari implementasi kebijakan public (Soldatos, 1990). Dalam bukunya *A Dictionary of Diplomacy*, Berridge dan Alan James menerangkan

bahwa Paradiplomasi merupakan aktivitas yang dilakukan dalam ruang lingkup internasional yang membawa tujuan politis dari aktor sub-nasional dalam suatu pemerintahan (Berridge & James, 2003)

Berbeda dengan kebijakan luar negeri yang dikeluarkan suatu negara, diplomasi regional tidak berusaha untuk mewakili kepentingan nasional yang lebih umum dan luas, kepentingannya lebih untuk menunjukkan pada masalah yang lebih khusus tanpa menyalahi aturan pada suatu kedaulatan Negara, dan berada pada pengawasan Negara, akan tetapi untuk mengembangkan daerahnya para actor tersebut mempunyai kebebasan dalam menentukan isu dan tujuan yang ingin dicapai, dalam menjalankan mekanismenya, para aktor diplomasi regional berada di bawah kedaulatan Negara dan mengikuti sistem internasional yang berlaku yang menjadikan aktor Negara sebagai penghubung untuk terciptanya hubungan tersebut, hal ini disebut Paradiplomasi (Keating, 2000).

Dalam acuan kerjasama *Intergovernmental Cooperation* dan *Intrastate Cooperation* yang dilakukan aktor non-negara, kerjasama antar sub-

pemerintahan didefinisikan sebagai susunan antara dua pemerintah atau lebih untuk mencapai tujuan-tujuan bersama, dan determinasi penyediaan suatu pelayanan atau memecahkan satu sama lain secara bersama-sama baik di dalam ataupun di luar negeri. Joseph Nye menjelaskan hubungan *trans-nasional* merupakan interaksi yang melewati tapal batas Negara dimana didalamnya terdapat lebih dari satu aktor non-negara, interaksi aktor non-negara yang melewati batas Negara tersebut dapat berupa pemerintah daerah maupun Provinsi, Organisasi Internasional, maupun Perusahaan Multinasional, yang termasuk paradiplomasi (Nye, 2000)

Michael Keating dalam bukunya, *Paradiplomacy In Action, The Foreign Relations of Subnational Governments* menjelaskan bahwa pengertian Paradiplomasi merupakan pengembangan dari adanya hubungan luar negeri secara langsung yang dilakukan oleh aktor sub-nasional, yang mempunyai tujuan tertentu dalam berbagai bidang, yang biasanya ditujukan untuk kesejahteraan daerah yang dinaungi pemerintah sub-nasional tersebut dibawah pengawasan pemerintah nasional dalam rangka menghadapi globalisasi (Keating, 2013)

Merujuk Ivo Duchacek pada “*Perforated Sovereignties: Towards a Typology of New Actors in International Relations*” dalam *Federalism and International Relations; The Role of Sub-national Units*, paradiplomasi merupakan: “Global Paradiplomasi yaitu paradiplomasi yang dilakukan oleh pemerintah sub-nasional di suatu negara dengan pemerintah sub-nasional di negara lain, baik kedua wilayah sub-nasional maupun kedua wilayah negara tersebut tidak berbatasan” (Duchacek, 1990). Sedangkan Panayotis Soldatos dalam *An Explanatory Framework for the Study of Federated States as Foreign-Policy Actors* dalam *Federalism and International Relations: The Role of Sub-national Units*, menjelaskan faktor-faktor pendorong paradiplomasi yang meliputi:

1. Dorongan dan upaya-upaya segmentasi baik atas dasar objektif (*objective segmentation*) antara lain didasari perbedaan geografi, budaya, bahasa, agama, politik dan faktor-faktor lain yang secara objektif berbeda dengan wilayah lain di negara tempat unit sub-nasional tersebut berada, maupun atas dasar persepsi (*perceptual*

segmentation atau *electoralism*) yang meskipun terkait dengan *objective segmentation* namun lebih banyak didorong oleh faktor-faktor politik.

2. Adanya ketidakseimbangan dan keterwakilan unit-unit sub-nasional serta pada unit nasional dalam hubungan luar negeri (*asymmetry of federated/sub national units*).
3. Perkembangan ekonomi dan institusional yang alamiah pada unit sub-nasional mampu mendorong pemerintah sub-nasional untuk mengembangkan perannya.
4. Kegiatan paradiplomasi juga bisa dilatarbelakangi oleh gejala internasional yang secara mudah dapat diartikan mengikuti hal-hal yang dilakukan unit sub-nasional lainnya.
5. Adanya kesenjangan institusional dalam perumusan kebijakan hubungan luar negeri dan in-efisiensi pelaksanaan hubungan luar negeri pada pemerintahan nasional.
6. Masalah-masalah yang terkait dengan *nation-building* dan konstitusional (*constitutional*

uncertainties) juga dapat mendorong pemerintah sub-nasional melakukan paradiplomasi.

7. Domestikasi politik luar negeri sebagai dampak dari mengemukanya isu-isu politik tingkat rendah telah memotivasi pemerintah sub-nasional yang mempunyai kepentingan (*vested systemic interest*) dan kompetensi paradiplomasi (Soldatos, 1990)

Begitu besarnya peran yang dilakukan aktor non-negara terhadap perkembangan suatu Negara menjadikan perlunya pemerintah untuk melakukan pendekatan dan membantu aktor non-negara lebih mendalam demi terciptanya integritas bersama.

3. Objek dan Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif analisis, metode ini adalah metode yang menyeluruh, dimaksudkan mencari data komprehensif terhadap semua objek kajian yang kemudian analisa serta melakukan perbandingan secara substansial. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian

kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan (Siyoto & Sodik, 2015)

Metode kualitatif adalah salah satu metode untuk mendapatkan kebenaran dan tergolong sebagai penelitian ilmiah yang dibangun atas dasar teori-teori yang berkembang dari penelitian dan terkontrol atas dasar empirik. Jadi dalam penelitian kualitatif tidak hanya menyajikan data apa adanya melainkan juga berusaha menginterpretasikan korelasi sebagai faktor yang ada yang berlaku meliputi sudut pandang atau proses yang sedang berlangsung.

Penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi didalam masyarakat, pertentangan 2 keadaan /lebih, hubungan antar variabel, perbedaan antar fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi, dan lainnya. Masalah yang diteliti dan diselidiki oleh penelitian deskriptif kualitatif mengacu pada studi kuantitatif, studi komparatif, serta dapat juga menjadi sebuah kajian korelasional satu unsur bersama unsur lainnya. biasanya kegiatan penelitian ini meliputi

pengumpulan data, menganalisis data dan diakhiri dengan sebuah kesimpulan yang mengacu pada penganalisaan data tersebut (Prastowo, 2012).

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Hubungan Bilateral Indonesia – Rusia

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Russia telah berusia hampir tujuh dasawarsa, atau tepatnya sejak 3 Februari 1950. Sejarah menunjukkan bahwa pasang-surut hubungan bilateral kedua negara tidak pernah mencapai titik nol sekalipun Indonesia pernah melakukan kebijakan penumpasan Partai Komunis pasca peristiwa 1965. Opsi pemutusan ataupun pembekuan hubungan diplomatik tidak pernah diambil oleh Jakarta sekalipun Indonesia secara jelas menetapkan kebijakan anti komunis pada periode Perang Dingin, khususnya pada era Orde Baru. Setelah bubarnya Uni Sovyet, hubungan bilateral Indonesia-Russia memasuki babak baru yang lebih nyaman karena tiadanya lagi hambatan secara ideologis.

Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri bahkan terjadi penandatanganan kemitraan strategis antar kedua negara pada tahun 2003. Pada era Presiden Susilo Bambang

Yudhoyono capaian yang sudah dilakukan sebelumnya direalisasi pada setidaknya sejumlah substansi yaitu: eksplorasi ruang angkasa, pemanfaatan energi atom, kerjasama bidang hukum, perlindungan intelektual, dan kerjasama militer/pertahanan. Keinginan dan ambisi Russia untuk ‘bermain’ di kawasan Asia Pasifik di bawah Vladimir Putin menunjukkan adanya indikasi yang kuat tatkala Russia lebih mendekati tidak hanya kawasan Asia Timur namun juga Asia Tenggara, khususnya Indonesia dan Vietnam – yang pernah disebut oleh sumber perwakilan Russia sebagai satu dari lima teman terdekat Russia di kawasan.

Kedua negara juga sama-sama sebagai anggota G-20 dan APEC, plus keanggotaan Russia dalam semua desain arsitek keamanan ASEAN seperti TAC 1976, ARF 1994, dan EAC 2011. Tidak bisa dielakkan bahwa Russia secara tradisional dan historis memiliki latar belakang hubungan yang dekat dengan Indonesia. Dengan Indonesia, Presiden Putin secara resmi penandatanganan beberapa nota kesepahaman diantaranya: kerjasama di bidang lingkungan hidup, kerjasama di bidang olah raga dan kepemudaan, kerjasama di bidang promosi dan perlindungan investasi,

kerjasama budaya dan sinematografi, kerjasama audit oleh BPK, kerjasama dalam pemberantasan terorisme, kerjasama terkait mekanisme perpanjangan utang, dan kerjasama antar institusi keuangan.

Di bidang teknologi militer dan pertahanan, Indonesia adalah 'pelanggan' setia pengguna arsenal persenjataan Russia mulai pada saat jaman Bung Karno tatkala Indonesia memborong sejumlah piranti militer tercanggih pada masanya seperti jet tempur MiG, kapal penjelajah 'Irian', selusin kapal selam Whiskey, peluru kendali, hingga pembom strategis Tupolev 16, dan kendaraan tempur. Dewasa ini apa yang dilakukan Indonesia terulang kembali dengan pembelian sejumlah peralatan militer seperti jet Sukhoi, helikopter tempur Mi, kendaraan tempur, dan kemungkinan kapal selam kelas Kilo.

Beberapa rekam jejak tersebut seyogianya bisa menjadi motivasi bagi semua elemen pada era diplomasi total, termasuk pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota). Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu daerah termaju di Indonesia layak untuk mengambil inisiatif membangun, mengembangkan dan memperluas

hubungan luar negeri dengan kawasan-kawasan lain dalam rangka untuk memperkuat motivasi dalam membangun daerah pada semua sektor melalui komparasi dan menjalin konsep *sister region* secara lebih aplikatif, praktis, dan komprehensif.

Terkait prospek hubungan yang lebih kuat antara Indonesia dan Federasi Russia, animo dan antusiasme masyarakat Russia sangat tinggi untuk lebih mengenal Indonesia secara dekat. Hal ini ditandai dengan sangat besarnya jumlah masyarakat Russia yang mengunjungi Pekan Indonesia atau *Indonesia Fair* pada setiap Bulan Agustus ketika tercatat rata-rata hampir 70 ribu pengunjung mendatangi event tersebut setiap tahunnya. Hal ini sudah barang tentu menjadi sebuah kesempatan dan peluang untuk menjalin hubungan yang lebih kuat khususnya di sektor ekonomi, sosial dan budaya. Pemerintah daerah seyogianya juga mampu menangkap hal ini dengan inisiatif untuk membuka hubungan langsung, salah satunya dalam program *sister region*. Selain itu, tujuan untuk perluasan hubungan adalah dalam rangka mendorong pembangunan sosial-ekonomi sekaligus promosi daerah dan peningkatan kapasitas aparatur serta

SDM melalui studi, riset, pertukaran, maupun mekanisme lain yang dikemas dalam mekanisme pendidikan dan pelatihan serta magang. Yang tidak kalah pentingnya bahwa hal ini juga ditujukan untuk semakin memperkuat pembangunan ekonomi berbasis peningkatan pendapatan dan kesejahteraan serta penguatan kapasitas serta skill pada domain suprastruktur di daerah-daerah yang menjadi target penandatanganan kerjasama.

4.2. Analisis Target Kerjasama

Untuk memberikan gambaran Republik Bashkortostan, secara ideal akan berangkat dari faktor geografis sebagai parameter pertama untuk dapat menetapkan indikator-indikator kondusif dan menguntungkan bagi dilakukannya sebuah kerjasama kemitraan komprehensif. Secara geografis, meskipun memiliki posisi sebagai *landlocked territory*, letak Bashkortostan memiliki makna ekonomi karena berada di tepi batas wilayah Asia dan Eropa.

Bashkortostan dapat menjadi pintu masuk bagi promosi dan pemasaran produk-produk Indonesia, khususnya dari Jawa Barat untuk wilayah Russia Ural dan sekitarnya, sekaligus kawasan

Asia Tengah dan Kaukasia dimana terdapat negara-negara Turkestan – diantaranya Turkmenistan, Tajikistan -, dan negara-negara Kaukasus seperti Azerbaijan, Armenia dan Georgia. Republik Bashkortostan memiliki enam kota utama selain Ufa sebagai ibukota, yaitu: Salavat, Neftakamsh, Agidel, Blagoveschensk, Sterilitamak dan Meleuz yang juga sebagai titik situs sektor industri dan manufaktur.

Wilayah ini juga dilewati tiga jaringan rel nasional yang membentang dari Russia Eropa ke wilayah Asia Tengah dan tepi Pasifik yaitu: Kuibhishevskaya, Gorkovskaya, dan Yuzhno-Uralskaya. Transportasi dengan melalui sungai-sungai –Belaya, Kama dan Volga - yang banyak terdapat di Bashkortostan memungkinkan akses lalu lintas menuju Laut Kaspia, Laut Azov, Laut Hitam, Laut Baltik, dan Laut Putih. Laut Kaspia adalah pintu masuk dan akses ke wilayah Asia Tengah dan sekitarnya – Turkestan. Sedangkan Laut Hitam adalah akses utama ke Timur Tengah melalui perairan Turki. Laut Baltik adalah akses utama pada koridor utara Russia menuju Eropa Barat. Dari ibukota Ufa terdapat akses jalan poros utama menuju Moskwa, Kazan, Samarra, Chelyabinsk, Orenburg, dan

Yekaterinburg (ibukota Ural) sebagai kota-kota penting konsentrasi sosial ekonomi di Russia.

Melalui kemitraan dengan Republik Bashkortostan, Provinsi Jawa Barat dapat mengupayakan perluasan jangkauan hubungan ekonomi dan perdagangan dengan wilayah-wilayah lain di sekitar Ural –Chuvasia, Tatarstan, Udmurtia, Mari El, dan Mordovia, plus sebagian Asia Tengah dan kawasan Kaukasia seperti dimaksud. Jawa Barat selayaknya mampu mengoptimalkan inisiatif untuk memulai secara intensif membuka relasi dan koneksi dengan wilayah dan kawasan yang selama ini relatif kurang dikenal di tanah air sehingga bukan tidak mungkin akan dapat diikuti oleh provinsi-provinsi lain. Diperlukan suatu kontinuitas rangkaian kontak dan komunikasi secara berkelanjutan dalam rangka merespon potensi dan kemungkinan hambatan serta persoalan teknis di lapangan.

Sebagai salah satu sentra industri dan manufaktur di Russia, Bashkortostan memiliki sekitar 150 industri dalam dengan aneka ragam produk, khususnya industri berbasis teknologi, industri berat dan industri kreatif. Menempati peringkat sembilan untuk *Gross Domestic Product* terbesar di Russia,

sektor industri dan manufaktur menjadi kontributor terbesar bagi Republik Bashkortostan selain pertanian dan konstruksi yaitu sekitar 2/3 total jumlah. Secara menyeluruh sektor manufaktur yang di dalamnya termasuk penyulingan minyak, produksi kimia, energi, industri mesin, dan produksi bahan mentah menyediakan 40% *GDP*, sekitar 60% pajak penghasilan, dan menyediakan hampir 30% lapangan kerja

Mengacu data tersebut, dapat diperoleh gambaran jelas bahwa potensi terbesar Bashkortostan adalah sektor industri, khususnya industri berat, energi dan petrokimia. Seperti yang telah disajikan secara garis besar pada bagian sebelumnya terdapat setidaknya lima item utama pada sektor industri yaitu: **industri pertahanan/militer, industri pengolahan makanan, industri energi, industri kimia-petrokimia, dan industri pertanian**. Lima industri terbesar yang menjadi andalan Republik Bashkortostan adalah: *Bashneft* (manufaktur pertambangan), *Bashspirt*, *Gazprom Neftekim Salavat* (energi), *Neftekamsk Avtomobile Plant*, dan *Ufa Engine Industrial Association*. *Bashneft* adalah salah satu unit usaha minyak terbesar keenam di Russia untuk volume

produksi dan menempati posisi keempat untuk total penyulingan minyak bumi.

Sedangkan lima potensi target investasi utama adalah: pertambangan, produksi mesin dan peralatan berat, pertanian, kimia-petrokimia, dan metalurgi (peringkat ketiga nasional untuk investasi dan tergolong yang relatif bebas resiko/ *low risk*). Sentra industri dapat dijumpai di beberapa kota dengan konsentrasi utama di Ufa sebagai ibukota wilayah. Ufa memiliki beberapa instalasi penting sektor perindustrian yaitu: industri material konstruksi Bashkortostan, pusat pengolahan kayu untuk konstruksi, sentra teknologi aviasi atau penerbangan (komponen pesawat dan helikopter), industri pertanian, sentra produksi instrumen petrokimia, sentra industri elektronika, industri peralatan medis dan kedokteran, manufaktur nano dan bio-teknologi, serta berbagai sentra industri kreatif. Tidak hanya instalasi industri, Ufa juga menjadi pusat dari fasilitas pelatihan teknik perindustrian seperti Institut Petrokimia dan Penyulingan Minyak Bumi, tempat pelatihan bio dan nano-teknologi, Institute Penerbangan Ufa.

Kemudain yang juga sangat potensial adalah Industri Pertahanan Militer dimana Kawasan Ural yang

termasuk bagian distrik Volga dikenal sebagai sentra produsen dan pemasok alat berat/ industri berat, tempat dimana salah satunya adalah Bashkortostan, selain Udmurtia, Mari El, Mordovia, Chuvasia, dan Tatarstan, serta Perm Krai, Nizhny Novgorod, Ulyanovsh, Samarra, Orenburg, Saratov dan Kirov. Sebagai gambaran, secara menyeluruh Distrik Volga menghasilkan 85% produksi otomotif – jenis-jenis kendaraan *Volzhky, Gorkovsky, Kamsky, Ulyanovsky* -, 65% mesin pesawat, 30% kapal, dan 30% produk peralatan militer, termasuk roket dan peluru kendali. Bersama dengan Republik Tatarstan, Perm Krai, Nizhny Novgorod, dan Samara, Bashkortostan termasuk wilayah tujuan investasi utama di Federasi Russia dengan mengacu pada data dan laporan Forbes berkenaan dengan indikator iklim investasi, perbankan, tingkat konsumsi, kekuatan pasar, inovasi, sumber daya alam, sektor keuangan serta perpajakan.

Sektor industri berat secara umum dimulai sejak tahun 1920-an tatkala *Ufa Engine Industrial Association* membuat mesin jet pertama di era Uni Sovyet. Terdapat setidaknya dua industri pertahanan ternama yang berada di Republik Bashkortostan yaitu *KUMAPE*

(*Kumertau Aviation Production Enterprise*) dan *Ufa Engine Building Production Association*. Berdiri sejak tahun 1962, *KUMAPE* merupakan industri yang menghasilkan berbagai varian helikopter *KAMOV (Ka)* yang dirancang untuk berbagai keperluan, termasuk militer, pesawat transport *Ilyushin (Il)* yang juga digunakan untuk penerbangan sipil. Sementara *Ufa Engine Building* yang berdiri sejak 1925 adalah perusahaan yang memiliki produksi traktor, instrumen generator, turbin, dan pompa gas, serta mesin-mesin pesawat seperti *Mikoyan Gurevich (MiG)* dan *Sukhoi*. *Ufa Engine Building* dalam laporan terkategori sebagai industri berat yang paling laku dengan volume penjualan dan omset yang terbesar tidak hanya di Russia, namun juga di Eropa Timur.

Sebagai industri mesin dan alat berat, *Ufa Engine* tercatat dalam sejarah sebagai salah satu ujung tombak industri nasional yang merancang berbagai instrumen pertahanan, termasuk varian-varian persenjataan dan pesawat Uni Sovyet antara Perang Dunia 1 dan Perang Dunia 2. Pada era modern dan Perang Dingin, Ufa menjadi basis produksi mesin-mesin pesawat tempur seri *MiG (MiG 15 hingga MiG 31)*, seri

Sukhoi (Su 15 hingga Su 39), serta pesawat tempur serbaguna *Yakovlev (Yak)*, *Beriev (Be)* dan pesawat pembom *Tupolev (Tu)*. Selain itu, *Ufa Engine* adalah pabrik yang merancang komponen roket dan peluru kendali, serta komponen helikopter dan kendaraan *Izhmash, UAZ, Kamaz*.

Sektor Pertanian dan Perternakan juga sangat potensial, Sekitar 40% populasi Bashkiria menempati wilayah pedesaan dengan produk pertanian sebagai mata pencaharian dengan area pertanian total 7,1 juta hektar lahan. Pemerintah Bashkortostan sangat mendukung sektor pertanian dan para petani sebagai elemen penting bagi upaya memperkuat dan menempatkan ekonomi Bashkortostan pada posisi tertinggi secara nasional sehingga diharapkan mampu mengangkat wilayah ini di mata dunia internasional. Bashkortostan menempati peringkat tujuh untuk produksi pertanian di Russia.

Varian produk pertanian dapat dijumpai beraneka-ragam mulai dari produk *diary* -susu, keju dan mentega (peringkat pertama nasional), peternakan sapi yang menghasilkan pasokan daging domestik (peringkat pertama nasional), peternakan kuda (kedua terbesar secara nasional), peternakan unggas (peringkat

enam nasional) hingga avikultur atau kombinasi budidaya pertanian dan kehutanan seperti madu (peringkat pertama nasional). Madu Bashkiria sangat dikenal dan digemari oleh masyarakat Russia. Selain produk-produk tersebut, Bashkortostan juga memiliki potensi utama gandum, gula bit, minyak nabati, dan sayuran.

Pemerintah Republik Bashkortostan memiliki beberapa langkah kebijakan untuk mendukung sektor agraris – pertanian dan peternakan diantaranya: pertama, penggunaan teknologi untuk pemrosesan bahan mentah produk-produk yang memiliki nilai kompetitif dengan fokus pada produksi tanaman biji-bijian termasuk gandum, jagung; pengembang-biakan ternak berbasis teknologi dan lingkungan; penerapan manajemen berbasis teknologi untuk penyediaan pakan ternak, berikut proses inseminasi. Kedua, menjaga mutu dan kualitas produk-produk peternakan – daging, susu, sosis- dengan menghindarkan campuran bahan-bahan kimia; memperkuat potensi alamiah untuk meningkatkan produk-produk utama lainnya seperti buah-buahan, sayuran, dan madu, serta produk-produk makanan kaleng. Khusus produk madu diberikan perhatian khusus mengingat

madu adalah salah satu produk prioritas Bashkortostan untuk ekspor dengan jumlah mencapai 2000 ton per tahunnya yang bisa menghasilkan pendapatan sekitar 1 juta rubel. Selain itu, Pemerintah Bashkortostan juga sangat memberikan perhatian utama pada produk tanaman obat-obatan terkait proses tanam hingga panen, yang dalam hal ini mampu menghasilkan sekitar 700 ton setiap tahunnya.

Untuk sektor kehutanan sebagai bagian ekonomi agraris, Bashkortostan memiliki area hutan seluas 6,2 juta hektar, sehingga mampu menghasilkan produk kehutanan hingga mencapai sekitar 750 juta meter kubik setiap tahunnya –termasuk 3 juta meter kubik kayu timber. Sejumlah jenis produk kehutanan diantaranya kayu ek, maple, dan kamper yang digunakan untuk konstruksi dan peralatan sehari-hari. Total produksi kayu rata-rata setiap tahunnya antara tiga hingga empat persen (3-4%) untuk produksi total nasional.

Sentra produksi hasil hutan tersebar di sejumlah wilayah seperti Meleuz, Sterlitamak, Ufa, dan Salavat dengan perusahaan besar yang dimiliki yaitu *Forestry Industry Company Selena*, dan LZK Bashlesprom. Sektor kehutanan

menjadi salah satu fokus dalam rangka untuk memenuhi asupan kebutuhan nasional, keperluan ekspor nasional berbasis kualitas dan teknologi tinggi, dan meningkatkan kapasitas serta nilai kompetitif Bashkortostan secara global, dan seperti halnya sektor industri petrokimia dan energi, akan menjadi identitas bagi wilayah tersebut.

4.3. Pemetaan Potensi Kerjasama

Dalam konteks kemitraan Sebagai langkah awal ada baiknya fondasi dari pembentukan *sister province* bisa dimulai dari kerjasama pelaku usaha dalam hal ini antara KADIN Jawa Barat, berikut asosiasi pengusaha dengan mitranya di Russia, termasuk khususnya di Bashkortostan. Dengan mengacu pada potensi yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Barat dan Republik Bashkortostan seperti yang dipaparkan pada bagian sebelumnya, dan secara lebih detail serta spesifik pada bagian setelah ini, dapat diperoleh gambaran jelas terkait beberapa sektor unggulan yang dapat dipertimbangkan secara prioritas dalam fokus kerjasama *sister province* yaitu:

Pertama, industri dan manufaktur dengan titik berat pada produk-produk berbasis sains dan teknologi serta

industri berat. Dalam hal ini industri otomotif, mesin pesawat, industri kimia dan petrokimia, serta industri pendukung sarana pertanian menjadi prioritas pertama. Seperti yang telah diketahui bahwa potensi pengembangan serta penguatan industri Jawa Barat yang terpuat di sepanjang poros Bekasi, Karawang, Purwakarta dapat dijadikan target untuk bermitra. Hal ini juga dapat ditambahkan dengan Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Bogor yang memiliki kapasitas serta potensi untuk industri kimia dan petrokimia. Jawa Barat juga menjadi tempat beberapa industri strategis seperti PT Dirgantara, Pindad, INTI, Dahana yang dapat dimitrakan dengan Bashkortostan. Kota Bandung yang juga menjadi situs industri medis dan kesehatan, Kimia Farma dan Bio Farma sekali lagi juga menempati daerah tersebut sebagai prioritas terdepan untuk bermitra yang pada gilirannya dapat didiseminasikan ke daerah-daerah lain di Jawa Barat.

Kedua, Arah perkembangan industri juga dapat dilakukan ke arah Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran terkait industri agraris atau pertanian, dan sub-sektor perikanan. Potensi untuk

sub-sektor peternakan dapat dilakukan dengan Kabupaten Garut, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Majalengka. Sedangkan industri energi-mineral – penyulingan minyak- dapat diarahkan ke Kabupaten Cirebon dan Indramayu.

Ketiga, secara umum, Bashkortostan yang memiliki banyak situs *eco-tourism*, wisata berbasis konservasi alam dan wisata kesehatan memiliki similaritas karakteristik dengan yang dimiliki Jawa Barat. Jawa Barat kemungkinan bisa termotivasi dalam kerangka kemitraan dalam membangun dan menyediakan sarana serta fasilitas sektor wisata seperti yang dimiliki Bashkortostan.

Keempat, seperti yang telah disinggung secara singkat sebelumnya, Jawa Barat yang menjadi sentra pendidikan tinggi semestinya juga dapat memanfaatkan potensi pendidikan tinggi serta riset di bidang sains dan teknologi, khususnya teknologi penerbangan, transportasi, energi-mineral, dan mesin-mesin untuk pertanian. Bashkortostan memiliki universitas dan institut yang memiliki studi perminyakan, energi, penerbangan, dan petrokimia. Jawa Barat sebagai salah satu yang terdepan atau barometer pendidikan nasional, khususnya untuk pendidikan tinggi

seyogianya dapat memanfaatkan konstruksi kemitraan dengan mengajak serta beberapa perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi seperti ITB, UNPAD, UPI, IPB yang memiliki fokus teknologi dan UNIKOM salah satunya dengan fokus teknologi informasi. Perguruan tinggi untuk pusat studi agama tidak bisa juga dilewatkan dalam membangun kemitraan, seperti Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati dengan Universitas Islam Bashkortostan dengan pemahaman umum bahwa Islam menjadi identitas historis, tradisi, dan sosiologis di kedua wilayah. Hal ini tentunya diharapkan akan dapat lebih menjadi perekat identitas dalam koridor kemitraan dan mekanisme *sister-province*.

5. Kesimpulan dan Rekomendasi

5.1. Kesimpulan

Sebagai salah satu wilayah paling menonjol di Federasi Russia, potensi Republik Bashkortostan relatif sangat besar untuk ekonomi, perdagangan dan investasi khususnya sektor industri dan manufaktur, pertanian, serta pengembangan riset dan teknologi. Menempati peringkat tinggi dalam berbagai catatan statistik terkait performa ekonomi dan perdagangan menjadi

Republik Bashkortostan sebagai sebuah wilayah yang memiliki daya tarik untuk industri dan perdagangan –status ramah dan kondusif untuk investasi, utamanya industri energi-mineral, petrokimia dan industri kimia, dan tentunya industri alat-alat berat. Secara umum, Republik Bashkortostan akan dapat menjadi mitra yang tepat dan sepadan bagi Provinsi Jawa Barat untuk dapat memperkuat kapasitas dalam meningkatkan performanya daerahnya utamanya sektor industri dan manufaktur berbasis teknologi –penerbangan, transportasi dan telekomunikasi, energi-mineral, dan industri pertanian.

Republik Bashkortostan dengan beragam potensinya akan dapat diharapkan memberikan motivasi dan dorongan Jawa Barat untuk menjadi sentra teknologi baik secara domestik atau nasional maupun di tingkat kawasan/ ASEAN. Karakteristik Bashkortostan yang kuat secara ekonomi hendaknya juga dapat meningkatkan dorongan bagi investasi, khususnya pada bidang-bidang tersebut, kepada Provinsi Jawa Barat. Hal ini juga akan terkait dengan upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan suprastruktur di Jawa Barat melalui upaya kerjasama pendidikan, pelatihan, dan riset untuk

bidang-bidang tersebut. Sekalipun tetap ada perbedaan, namun secara menyeluruh bangunan atau konstruksi kemitraan dalam kerangka *sister-province* akan banyak menuai kemanfaatan bagi Jawa Barat. Jawa Barat hendaknya dapat mengajak dunia akademik dan riset untuk bagaimana bersama-sama memacu peningkatan kapasitas, khususnya dalam melibatkan perguruan tinggi untuk turut menggarap kemitraan ini, dan sekaligus melakukan pertukaran ilmu, pengalaman, dan riset dalam rangka bersama-sama mengupayakan peningkatan kapasitas antara kedua wilayah.

5.2. Rekomendasi

Beberapa Rekomendasi yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah, *pertama*, Dalam Upaya memperkuat kapasitas Industri, Jawa Barat dapat mengirimkan Insinyur-insinyur baik itu dari industri manufaktur, penerbangan, petrokimia, militer untuk belajar ke Bashkortostan. *Kedua*, Jawa Barat hendaknya dapat mengajak dunia akademik dan riset untuk bagaimana bersama-sama memacu peningkatan kapasitas, khususnya dalam melibatkan perguruan tinggi untuk turut menggarap kemitraan ini, dan sekaligus melakukan

pertukaran ilmu, pengalaman, dan riset dalam rangka bersama-sama mengupayakan peningkatan kapasitas antara kedua wilayah. *Ketiga*, Dalam upaya mengembangkan Kerjasama terkait lingkungan hidup. diperlukan kerja sama dalam pengelolaan dan pengendalian limbah perindustrian yang mencemari lingkungan dan memulihkan kondisi sungai yang ada di Jawa Barat, yang selama ini menjadi masalah bagi Jawa Barat, *Keempat*, Transfer ilmu dan teknologi dalam pengelolaan dan pemberdayaan lahan agrikultur dengan optimal mengingat Republik Bashkortostan dan Provinsi Jawa Barat memiliki masalah yang sama, yaitu semakin menyusutnya agrikultur akan tetapi, mereka mampu menanggulangi masalah tersebut melalui inovasi dan teknologi pertanian. *Kelima*, Dalam membangun Kerjasama Pariwisata dapat dilakukan dengan Pemasaran bersama (*joint marketing*) dalam mempromosikan tempat wisata yang ada di daerah masing-masing. serta memberi kemudahan dalam visa dan permit.

Daftar Pustaka

- Aldecoa, Francisco and Keating, Michael. 2013. *Paradiplomacy in Action : The Foreign Relations of Subnational Government*. New York. Routledge
- Berridge, GR and James, Alan. 2003. *A Dictionary of Diplomacy*. Second Edition, New York :Palgrave Macmillan
- Birch, Eugenie L. and Wachter, Susan M. 2011. *Global Urbanization*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Castells, Manuels. 2003. “*Global Networks and Local Societies: Cities in the Information Age*”. dalam Steven Vertovec dan Darrell A. Posey (eds). *Globalization, Globalism, Environments and Environmentalism: Consciousness of Connections*. Oxford: Oxford University Pres
- Carter, Neil. 2001. *The Politics of the Environment: Ideas, Activism, Policy*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Chatterji, Rakhahari and Saha Swagata. 2017. "Paradiplomacy: Concept and the Context", *India Quarterly : Journal of International Affairs*. Vol 73. Issue 4. pp. 375 – 394
- Dharmajaya, Andriani Florencia dan Raharyo, Anggara. 2019. "Decentralization of Foreign Cooperation: Case Study of Sister Province Cooperation between West Java, Indonesia and South Australia," *Jurnal Politica*, Vol. 10 No. 1, pp. 39 – 56
- Duchacek, Ivo D. 1990. "Perforated Sovereignities: Towards a Typology of New Actors in International Relations" dalam Hans J. Michelman dan Panayotis Soldatos (ed), *Federalism and International Relations: The Role of Subnational Units*, Oxford : Clarendon Press.
- Frankel, Joseph. 1970. *National Interest*. London : Palgrave Macmillan
- Garesche, Zapata, 2007, *Guidelines for International Relations of Local Government and Decentralized Cooperation between the European and Latin America*. Diputacion de Barcelona. Dalam <http://www.obserocd.org/temp/1iberia-148.pdf>. 2007. Diakses 20 September 2021
- Keating, Michael. 2000. "Going Beyond Paradiplomacy ? Adding Historical Institutionalism to Account to Regional Policy Competences". *Hannover : Forum of Federation an International Federalism*
- Kern, Kristin. 2009. *Cities in European Setting*, dalam *the Conference of Innovation for Good Local and Regional Governance: A European Challenge*, 2-3 April. University of Twente (Erschede)
- Masrohatun, 2018, "Implementasi Kebijakan Kerjasama Luar Negeri Sister Province di Provinsi Jawa Tengah", *Jurnal SAWALA*, Vol 6 No 1, pp. 49-62

- Michelmann, Hans dan Soldatos, Panayotis. 1990. *Federalism and International Relations: The Role of Sub-national Units*. Oxford : Clarendon Press
- Mukti, Takdir Ali dkk. 2019. "Paradiplomacy Management and Local Political Movement in Aceh, Indonesia, and Catalonia, Spain", *European Journal of East Asian Studies*. Vol 18: Issue 1. pp.66 – 92
- Nye, Joseph. 2000. *Governance in A Globalizing World*. Washington : Brookings Institution Press
- Prastowo, Andi. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Segura, Caterina Garcia dan Etherington, John. 2017. "National State Foreign Policy And Regional External Action : An Uneasy Relationship" Euborders WorkingPaper 07 (series)
- Siyoto, Sandu dan Sodik, M. Ali. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Literasi Media Publishing
- Soldatos Panayotis. 1990. *An Explanatory Framework for the Study of Federated States as Foreign- Policy Actors dalam Federalism and International Relations: The Role of Sub-national Units*. Oxford : Clarendon Press.
- Villiers, J.C De. 2006. "Achieving the Millenium Development Goals through City to City Partnerships: Origins, History and Context of City to City Partnership", dalam the 50th Anniversary Conference of Sister Cities International, 13th July. Washington, D.C,